

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SDN 9 PALANGKA DI KOTA PALANGKA RAYA

**Betty Karya**

Universitas PGRI Palangka Raya

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 9 Palangka, (2) mengetahui tingkat kesiapan Guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Palangka Raya, (3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Palangka Raya.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, Lokasi Penelitian bertempat di SDN 9 Palangka kota Palangka Raya. Metode penarikan sampel adalah purposive sampling. Sumber Data berasal dari Informen, Dokumen, atau arsip. Teknik Pengumpulan Data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis Data menggunakan Analisis Interaktif Miles-Huberman sedangkan Validitas Datanya menggunakan triangulasi teknik atau Triangulasi sumber.

Hasil penelitian implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah (1) Pada dimensi komunikasi atau sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bahwa implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (2) Sumber daya dari aspek yang belum memadai misalnya sarana dan prasarana dan jumlah guru pembimbing khusus yang masih kurang untuk menangani anak berkebutuhan khusus (3) Pada dimensi disposisi penerimaan guru terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, namun dari aspek pemberian insentif oleh (Direktorat atau Dinas pendidikan Kota Palangka Raya) sangat belum memadai baik insentif untuk guru maupun untuk sekolah. Sedangkan pada dimensi struktur birokrasi juga kurang memadai, hal ini terlihat belum adanya tim khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, seperti : guru pembimbing khusus, tim ahli dari berbagai disiplin ilmu (dokter, psikolog, dll).

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Pendidikan inklusif

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat menjamin terbukanya jalan bagi setiap individu manusia untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dalam kehidupan berbangsa, pendidikan juga memegang

sebuah peranan penting, yaitu sebagai salah satu sarana pencapaian tujuan negara. Pendidikan merupakan pondasi bagi terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan SDM yang berkualitas akan berdampak positif bagi berlangsungnya pembangunan, yang

merupakan langkah penting tercapainya tujuan negara.

Sebagaimana disebut dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, mengatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan yang mulia itu hendaknya dijadikan motivasi untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai elemen pendidikan terutama pemerintah yang dalam hal ini, memegang peranan penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak anak-anak Indonesia yang sekarang ini tidak

dapat menikmati suasana belajar dibangku sekolah. Tidak sedikit pula anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah sama sekali karena alasan ekonomi yang kemudian diperparah lagi dengan mahalnya biaya pendidikan sekarang ini. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai pelindung terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah seyogyanya membuat suatu kebijakan yang mana dalam kebijakan tersebut berisi mengenai solusi-solusi terbaik dalam mengatasi masalah pendidikan. Bukan hanya sebagai suatu kebijakan yang dijadikan slogan semata, namun perlu ada tindakan riil agar masalah-masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara baik. Disahkannya UU RI No 20 tentang Sisdiknas tahun 2003, telah memberikan angin segar dan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan pasal 15 tentang Pendidikan Khusus yang menyebutkan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan

berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sungguh merupakan harapan bersama program penyelenggaraan sekolah inklusif ini dapat terlaksana dengan baik atas dasar kepedulian seluruh pihak, baik dari pemerintah setempat, kepala sekolah, komite sekolah, guru umum, guru khusus, peserta didik normal, dan orangtua sehingga peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat belajar secara maksimal dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna.

Berdasarkan latar belakang dari persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pernyataan masalah yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini sebagai berikut

Bagaimana implementasi kebijakan Penyelenggaraan pendidikan inklusif Apakah ada kesiapan guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Palangka Raya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini untuk Mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif Mengetahui tingkat kesiapan guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan

pendidikan inklusif Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang searah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para *mobiliasior* atau para aparat yang berkepentingan.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan bahkan jauh

lebih penting dari pada proses pembuatan kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam kebijakan”. Van Meter dan Van Horn dalam Wahap, (2005:65)

Perumusan lebih rinci mengenai kebijakan sebagaimana dikutip bahwa implementasi kebijakan adalah :

“...Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat/tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.” ( EdwardIII dalam Winarno,2007:174)

Pendapat dari ahli kebijakan yang lebih menfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif *bottom up* adalah

“...implemntasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial

dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.” ( Smith dalam Islamy, 2001: 90 )

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. *Idealized policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2. *Target groups* yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagai mana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perlakuan dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. *Implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factors* yaitu unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. ( Smith dalam Islamy, 2001: 90 ).

### Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur –prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu dan juga menyangkut masalah konflik “ keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. (Grindle,1980 dalam Wahap,2010:59).

Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, setelah perumusan kebijakan ditetapkan. Bahkan dengan tegas menyatakan bahwa:

*“...the execution of policies is as important it not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”.* (Udoji1981:32 )

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Begitu menentukan dan strategisnya fungsi dan peranan implementasi: “menberikan porsi 60% (persen) untuk implementasi sebagai penentu keberhasilan, dan sisanya 20% untuk rencana dan 20% lagi adalah

bagaimana kemampuan mengendalikan implementasi itu sendiri, ( Nugroho 2006:11 )

Kebijakan publik yang telah disyahkan, tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, karena implementasi kebijakan berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita. Dengan kata lain, Pelaksanaan kebijakan publik masih menimbulkan hasil (*outcome*) yang dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups* )

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu ( atau kelompok ) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentranspormasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang dinamakan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

*“...memahami apa yang dinyatakannya terjadi sesudah suatu program dinyakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup*

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian". ( Mazmanian dan sabatiar, 1983: 4 )

Definisikan ini menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan ( *intended* ) maupun yang tidak diharapkan ( *unintended* ) dari suatu program.

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan sekaligus menegangkan. Proses ini menjadi penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat pada implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apa pun rumusan kebijakan yang dibuat jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat

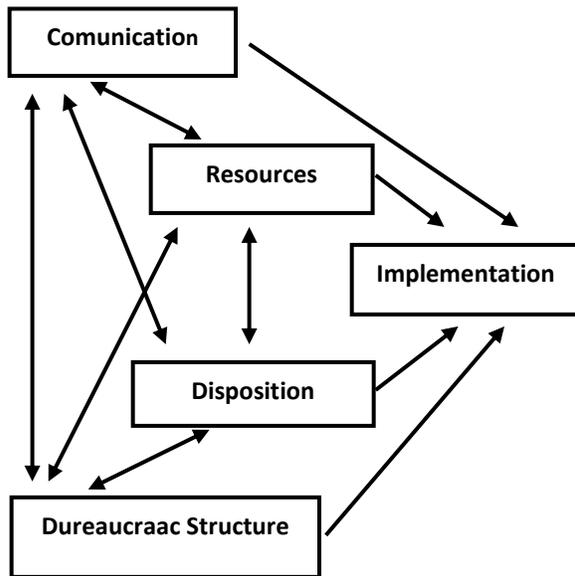
dirasakan manfaatnya. Sebaliknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika sudah di implementasikan, akan lebih bermanfaat apa pun hasilnya.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang pendidikan inklusif dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. George C. Edwards III Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: komunikasi (*Communications*), sumber daya (*resources*), disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)" Edwards III (1980)

Secara operasional faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menurut Edwards III dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Pengaruh langsung dan tidak langsung dalam Implementasi



Sumber: George C.Edward III: Implementing Public Policy, 1980;148

**Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif memiliki pengertian yang beragam. mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah : sekolah yang menampung semua peserta didik dikelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menentang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar peserta didiknya berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota

masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi”. (Stainback, 1990)

Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus atau anak luar biasa disekolah atau lembaga pendidikan anak. (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak) bersama dengan teman-teman sebayanya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap anak tanpa terkecuali: Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua anak belajar bersama-sama, baik dikelas atau sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak”. ( Djuan Sunanto,2004:3 )

Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup kegiatan. *Pertama*, menyediakan sumber daya (anggran, personil dan sarana )bagi pelaksana kebijakan. *Kedua*, melakuka interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam

bentuk peraturan pelaksanaan dan menuntut kebijakan pelaksana. *Ketiga*, menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menuntut waktu, tempat situasi dan anggaran. *Keempat*, pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana material lainnya. *Kelima*, memberikan manfaat dan atau penggunaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umum. (Surbakti, 1999 ).

### **Konsep Pendidikan Inklusif**

Hambatan utama anak berkelainan untuk maju termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada kecacatannya, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat. Selama ada alat dan penanganan khusus, maka mereka dapat mengatasi hambatan kelainan itu. Justru yang sulit dihadapi adalah hambatan sosial. Bahkan, hambatan dalam diri anak yang berkelainan itupun umumnya juga disebabkan pandangan sosial yang negatif terhadap dirinya. Untuk itulah, pendidikan yang terselenggara hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan potensinya secara individual. Inklusif adalah suatu sistem ideologi dimana secara bersama-sama tiap-tiap warga sekolah yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas

administrasi sekolah, peserta didik dan orang tua menyadari tanggung jawab bersama dalam mendidik semua peserta didik sedemikian sehingga mereka berkembang secara optimal sesuai potensi mereka.

Walaupun dalam pendidikan inklusif berarti menempatkan peserta didik berkelainan secara fisik dalam kelas atau sekolah regular, inklusif bukanlah sekedar memasukkan anak berkelainan sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar peserta didik normal. Inklusif merupakan suatu sistem yang hanya dapat diterapkan ketika semua warga sekolah memahami dan mengadopsinya”. ( Hermawan, Budi, 2003)

Inklusif menyangkut juga hal-hal bagaimana orang dewasa dan teman sekelas yang normal menyambut semua peserta didik dalam kelas dan mengenali bahwa keanekaragaman peserta didik tidak mengharuskan penggunaan pendekatan tunggal untuk seluruh peserta didik. Dalam perkembangannya, inklusif juga termasuk peserta didik yang dikaruniai keberbakatan, mereka yang hidup terpinggirkan, memiliki kecatatan, dan kemampuan belajarnya berada di bawah rata-rata kelompoknya. Dari pendidikan Inklusif ini adalah:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak ( termasuk anak kebutuhan khusus) mendapat

- pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar
  3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dengan strateginya yang cocok dan relevan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN 9 Palangka Kota Palangka Raya. Subyek Penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sub-Dinas PLB, Kepala sekolah, Guru SDN 9 Palangka sebanyak 6 (orang), peserta didik dan orang tua.

Teknik pengumpulan data yang digunakan Observasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk berbagai kegiatan belajar mengajar di kelas, dan bentuk-bentuk partisipasi mereka dalam pelaksanaan program pengajaran pendidikan inklusif di SDN 9 Palangka, dan Wawancara (*interview*) dengan informasi kunci maupun informen lanjutan mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif

pada SDN 9 Palangka kota Palangka Raya, Serta studi dokumentar menyangkut pereturan, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SDN 9 palangka di kota Palangka Raya.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi atau catatan lapangan, pedoman wawancara, yaitu catatan yang berisi pokok masalah atau hal yang diinginkan oleh penulis sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu menyangkut implementasi kebijakan, proses pendidikan inklusif dan faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan inklusif dalam meningkatkan pendidikan inklusif, serta dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau rekaman.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan masalah yang telah menjadi konsen bersama. Kebijakan

penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang mengacu kepada beberapa ketentuan yang telah digariskan oleh kesepakatan di tingkat dunia dan ketentuan yang telah digariskan pemerintah Indonesia di tingkat pusat.

Pendidikan inklusif yang dimaksud dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi kota Palangka Raya merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan tersebut secara yuridis di masukkan ke dalam jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu pendidikan yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan.

Pemerintah kota palangka Raya mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif lewat perda pencahangan walikota no.26 tahun 2014 tentang pendidikan khusus, pendidikan inklusif dan pusat sumber. Hal ini sebagaimana dikatakan Kepala Bidang TK, SD, PLB

Dinas Pendidikan kota Palangka Raya, yaitu: kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Palangka Raya berdasarkan hasil kebijakan yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat PSLB Kementrian Pendidikan Nasional. Kebijakan Direktorat PSLB ini terkait dengan kesepakatan di tingkat dunia dimana anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, khususnya dalam hal fisik dan emosional diberikan kesempatan untuk bersekolah atau mengenyam pendidikan. Sebenarnya dari dulu, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini sudah diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SLB. Namun kenapa tidak jika pendidikan mereka dijadikan satu di sekolah reguler dari mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.” (Hj. Ida Sutiana,SH)

Pendidikan inklusif yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan kota Palangka Raya adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan dalam hal fisik, mental, dan emosional agar mereka dapat belajar bersama-sama di sekolah reguler bersama-sama anak-anak normal lain.

Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

a) Kriteria calon sekolah penyelenggara

pendidikan Inklusif

- 1) Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua)
  - 2) Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah
  - 3) Tersedia guru pendidikan khusus (GPK) dari PLB (guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain)
  - 4) Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar
  - 5) Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan
  - 6) Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak
  - 7) Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif
  - 8) Sekolah tersebut telah terakreditasi memenuhi Prosedur administrasi yang ditentukan
- b) Mekanisme Penyelenggaraan
- Untuk keperluan administrasi dan pembinaan, serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu mengikuti prosedur sebagai berikut:
- 1) Sekolah yang akan menerima anak

berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menindaklanjuti proposal/laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan.
- 4) Dinas Pendidikan Provinsi sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif**

1. Kesiswaan
- Kebijakan yang terkait dengan kesiswaan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan

menerima semua kategori anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam implementasi di lapangan, tidak serta semua jenis kebutuhan khusus yang dimiliki peserta didik dapat diterima di sekolah reguler. Proses skrining dan assesment selalu dilakukan sebelum peserta didik berkebutuhan khusus masuk di sekolah reguler.

## 2. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan inklusif sama dengan kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan inklusif karena program pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah-sekolah reguler. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 disebutkan bahwa kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus

masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 9 Palangka Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai, dimensi komunikasi atau sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bahwa implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sumber daya dari aspek yang belum memadai misalnya sarana dan prasarana dan jumlah guru pembimbing khusus yang masih kurang untuk menangani anak berkebutuhan khusus.

Penerimaan guru terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, namun dari aspek pemberian insentif oleh (Direktorat atau dinas pendidikan Kota Palangka Raya) sangat belum memadai baik insentif untuk guru maupun untuk sekolah. Sedangkan pada dimensi struktur birokrasi juga kurang memadai, hal ini terlihat belum adanya tim khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, seperti : guru pembimbing khusus, tim ahli dari berbagai disiplin ilmu (dokter, psikolog, dll).

## Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

Dalam aspek komunikasi, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (Kementrian Pendidikan Nasional, Dinas pendidikan tingkat propinsi ataupun kabupaten/kota) dan instansi terkait secara terperinci dan mendalam mengenai penyelenggaraan bagi sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh pemerintah (Kementrian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan tingkat Propinsi ataupun Kabupaten/kota) dan instansi terkait. Bimbingan dan pendamping dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan forum-forum diskusi atau bentuk kegiatan lainnya, Dari aspek sumber daya, adanya bantuan dana, sarana prasaran, ataupun pengangkatan guru pembimbing khusus memperlancar kegiatan belajar dan pembelajaran, Dari aspek disposisi, agar guru dapat mempertahankan sikap positif terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan bagi pemerintah untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada sekolah maupun guru yang telah menjalankan tugas. Sedangkan dari struktur birokrasi agar adanya tim khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang disertai uraian tugas yang jelas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, James E., dkk., *Public Policy and Politics in America*, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1984
- Amuda, Heryanto. (2003). *Strategi Dukungan Dalam Pendidikan Inklusif*. Bandung: Pokja Implementasi Pendidikan Inklusif Propinsi Jawa Barat.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia,
- Arikunto Suharsimi. 1998. *Pengelolaan Kelas dan Peserta didik*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Banathy, Bela H. 1992. *A Systems View of Education: Concepts and Principles for Effective Practice*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Budiono dan Ella Yulelawati. 1999. "Penyusunan Kurikulum Berbasis Kemampuan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No.019, Tahun Ke-5 Oktober 1999. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Conny Semiawan. A.s. Munandar. S.C. Utami Munandar. 1987. *Memupu Bakat dan Kreativitas Peserta didik Sekolah Menengah. Petunjuk Guru dan Orang Tua*. Jakarta: Gramedia.
- Choiri, Abdul Salim. dkk. 2009. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus secara Inklusif*.
- Dalyono.M. 2001. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rieneka Cipta. Davidoff, LL. 1988. "Introduction To

- Psychology”, alih bahasa Mari Juniati, *Psikologi Suatu Pengantar Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Edwards III, George C. dan Ira Sharkansky, *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*, San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1978
- , George C. 1980, *Implementing public policy*, congressional quaterly Inc
- Efendy, onong uchjana (2009) *ilmu komunikasi teori dan praktek*: Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Freire, Paulo. 1999. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Teij. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermawan, Budi. (2003). *Konsep Pendidikan Untuk Semua*. Bandung: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Herman sofyandi (2008), *manajemen sumber daya manusia*, yogyakarta: graha ilmu.
- Jonas, C.O. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV Alfabeta, 2001.
- Krippendorff, Klaus. 1991. *Content Analysis: Introduction Its Theory and Methodology*”, Alih Bahasa Farid Wajidi, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali.
- Margaret. E Bell. Gredler. 1994. *Learning and Instruction*. Alih bahasa Munandir. *Belajar dan membelajarkan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills CA: Sage Publications.
- Moleong, L.J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Miftah, Thoha, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moekijat (1995), *Analisis kebijakan publik*, Bandung: mandar maju
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Stidi Tentang Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- , Noeng. 2004. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- , Noeng. 2006. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial: Sustainabilitas dalam Social Construe*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Mudyaharjo, Redja. (2001). *Pengantar Pendidikan* (Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia). Rajawali Pers, Jakarta
- Nanang Fatah. 2012. *Analisis kebijakan Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Patton, M.Q. 1980. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, CA.: Sage Publication.
- Sardinian A. M. 2001. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali.
- Slameto. 1988. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Saylor, J.G. 1981. *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning, Fourth Edition*. Japan: Holt.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York, N.Y.: holt, Rinehart, and Winston.
- Sutopo, H.B. 1995. *Kritik Seni Holistik Sebagai Model Pendekatan Penelitian Kualitatif* Surakarta: UNS Press.
- , H.B. 1996: *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Jumsan Seni Rupa Fakultas Sastra UNS.
- Tirtaraharja, Umar Dan La Sul. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Waloyo, H.J. 2000. "Hermeneutik Sebagai Pusat Pendekatan Kualitatif", dalam *Historika*, No.1 1. Surakarta: PPS UNJ KPK UNS.
- Winataputera, US. 1992. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Depdikbud.
- Yin, R.K. 1987. *Case Study Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.